

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pendidikan adalah pembudayaan hasil budi manusia yang beradab dan hasil perjuangan manusia terhadap dua kekuatan yang senantiasa menyertainya yaitu kodrat alam dan tuntutan zaman atau masyarakat (Dewantara, 1994). Berdasarkan pengertian yang dikemukakan Ki Hajar Dewantara tersebut, pendidikan mempunyai peran sangat penting bagi perkembangan manusia sebagai individu (*memayu hayuning sariro*), sebagai bangsa (*memayu hayuning bongso*) maupun sebagai bagian dunia pada umumnya (*memayu hayuning buwono*). Bagi bangsa Indonesia, arti pendidikan secara jelas termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Sisdiknas) yang menyatakan bahwa :

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spriritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 3 Undang-Undang Sisdiknas lebih lanjut menjelaskan bahwa tujuan pendidikan di Indonesia bukan hanya untuk mencerdaskan kehidupan bangsasesama tetapi jugamempunyai tujuan menanamkan akhlak dan sikap untuk membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Tujuan pendidikan nasional inilah yang diharapkan menjadi *output* dari setiap satuan pendidikan yang ada di Indonesia baik pada jalur formal, non formal maupun informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Tujuan serta keberlangsungan pendidikan nasional merupakan tanggung jawab pemerintah serta seluruh komponen masyarakat termasuk orang tua dan tentu saja merupakan tanggung jawab setiap peserta didik. Kewajiban peserta didik terhadap tercapainya serta berlangsungnya pendidikan nasional secara khusus diatur pada

Pasal 12 Undang-Undang Sisdiknas yang diantaranya mewajibkan setiap peserta didik untuk “...menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan.”

Salah satu norma pendidikan yang dibuat untuk menjamin keberlangsungan dan keberhasilan proses pendidikan di tiap sekolah adalah tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah adalah peraturan yang harus dipatuhi oleh seluruh warga sekolah agar proses pendidikan yang berlangsung di sekolah tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien (Rifai, 2011, hlm.139-140). Dengan payung hukum Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.14/U/1974, sudah menjadi kewajiban seluruh warga sekolah untuk menaati tata tertib sekolah, karena pada hakekatnya tata tertib sekolah merupakan bagian dari sistem persekolahan dan bukan suatu kelengkapan sekolah belaka (Suryosubroto, 2004, hlm.82).

Berdasarkan observasi pendahuluan yang telah dilakukan peneliti, saat ini kita masih bisa dengan mudah melihat siswa dari berbagai jenjang pendidikan yang mengabaikan/ melanggar tata tertib sekolah tanpa merasa risih ataupun bersalah, mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran tata tertib sekolah mulai dari pelanggaran yang dapat dianggap ringan seperti mengenakan pakaian seragam tidak sesuai aturan, terlambat datang ke sekolah, buang sampah sembarangan, mencoret-coret hingga melakukan pelanggaran yang dapat dianggap serius seperti merokok, minum minuman keras, melakukan pelanggaran lalu lintas hingga melakukan tawuran antar siswa. Situasi masih banyaknya pelanggaran tata tertib sekolah oleh siswa tersebut telah banyak diteliti dan hasilnya telah dipublikasikan melalui jurnal-jurnal penelitian diantaranya hasil penelitian yang telah dilakukan Akmaludin dan Haqqi (2019) yang menemukan permasalahan disiplin pada anak-anak jenjang sekolah dasar, dan hasil penelitian Handriyani dan Somantri (2019) yang juga menemukan permasalahan disiplin pada siswa-siswa jenjang sekolah menengah pertama.

Banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan siswa terhadap tata tertib sekolah merupakan indikator dari masih rendahnya kedisiplinan yang dimiliki siswa, dan rendahnya kedisiplinan siswa ini perlu mendapat perhatian serius serta

sesegera mungkin dari berbagai pihak terkait khususnya dari pihak sekolah, karena jika tidak segera diatasi bukan tidak mungkin akan berakibat kurang baik bukan hanya bagi siswa bersangkutan namun akan mengganggu jalannya proses pendidikan siswa-siswa lainnya. Meskipun penanganan rendahnya kedisiplinan siswa di sekolah merupakan tanggung jawab seluruh pihak terkait, pengampu pendidikan kewarganegaraan di sekolah memegang peranan dan kewajiban khusus dalam penanganan masalah ini, hal ini disebabkan pendidikan kewarganegaraan menjadi salah satu pelajaran yang wajib ada dalam setiap jenjang pendidikan menurut pasal 37 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dalam penjelasannya disebutkan bahwa pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Selain itu lebih lanjut Wahab & Sapriya (2011, hlm. 31) mengemukakan bahwa:

Secara umum tujuan negara mengembangkan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah agar setiap warga negara menjadi warga negara yang baik (*to be good citizenship*), yakni warga negara yang memiliki kecerdasan (*civic intelligence*), baik intelektual, emosional sosial, maupun spiritual; memiliki rasa bangga dan tanggung jawab (*civic responsibility*); dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (*civic partisipation*) agar tumbuh rasa kebanggaan dan cinta tanah air.

Dengan demikian secara tidak langsung rendahnya kedisiplinan siswa di sekolah dapat menjadi indikator dari belum tercapainya tujuan pendidikan kewarganegaraan yang dilakukan.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi rendahnya kedisiplinan siswa khususnya dalam melaksanakan tata tertib sekolah sebagaimana permasalahan yang dihadapi, dapat dilakukan melalui penanaman rasa tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik yaitu warga negara yang senantiasa bertindak dengan mematuhi semua peraturan yang ada, baik itu peraturan yang berada di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat maupun bangsa dan negara, termasuk senantiasa mematuhi tata tertib sekolah yang berlaku di lingkungan sekolah. Penanaman rasa tanggung jawab sebagai warga negara yang baik, khususnya dalam kedisiplinan, dapat dilakukan secara intra kurikuler maupun. Selain

berupaya melalui penanaman rasa tanggung jawab terhadap peraturan yang berlaku atau penanaman rasa disiplin, upaya lain yang dapat dilakukan untuk mengatasi masih rendahnya kedisiplinan siswa terhadap pelaksanaan tata tertib sekolah dapat diupayakan melalui pemberian hukuman. Menurut Gaza (2012, hlm. 17), hukuman merupakan salah satu alat dari sekian banyak alat lainnya yang dapat digunakan untuk meningkatkan perilaku yang diinginkan dan mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Namun permasalahan lain yang timbul dari pemberian hukuman ini adalah adalah hukuman apa yang paling cocok untuk dilakukan dalam upaya meningkatkan kedisiplinan siswa melaksanakan tata tertib sekolah tersebut, karena sejalan dengan perkembangan dunia pendidikan, hukuman fisik saat ini tidak lagi efektif untuk digunakan karena dapat menimbulkan efek negatif bagi korban (Susana, 2007, hal.19).

Solusi yang mungkin cukup tepat untuk menjawab permasalahan ini adalah melalui penerapan *punishment point system* atau dalam pendidikan di luar negeri lebih dikenal dengan istilah *demerit* (<https://ontario.ca>). *Punishment point system* pertama kali diperkenalkan oleh *Department of Public Highway of Ontario* pada tahun 1959 untuk mengatasi tingginya angka pelanggaran lalu lintas, hukuman inimerupakan suatu hukuman yang tidak bersifat hukuman badan atau hukuman fisik akan tetapi merupakan suatu hukuman yang lebih bersifat administratif. Dalam implementasinya, *punishment point system* adalah suatu kebijakan sekolah untuk meningkatkan kepatuhan (disiplin) siswa terhadap tata tertib sekolah dimana setiap pelanggaran tata tertib sekolah diberi poin sesuai tingkat kesalahannya dan poin pelanggaran tersebut akan ditambahkan atau dikurangkan pada poin siswa yang melakukan pelanggaran (tergantung sistem poin yang digunakan) hingga mencapai batas poin tertentu yang mempunyai konsekuensi tertentu pula seperti pemanggilan orang tua untuk menandatangani perjanjian, pemanggilan orang tua untuk menerima peringatan terakhir hingga siswa bersangkutan dikembalikan kepada orang tuanya.

Punishment point system diharapkan dapat efektif untuk meningkatkan kedisiplinan siswa di sekolah dalam melaksanakan tata tertib sekolah. Melalui *punishment point system* tindak kekerasan fisik yang mungkin terjadi di sekolah

sebagai hukuman dapat dihindari. Sebagai hukuman yang bersifat administratif, *punishment point system* tidak menimbulkan efek yang negatif berupa trauma maupun dendam pada para siswa yang sering timbul akibat hukuman fisik, akan tetapi dengan sistem ini siswa akan lebih berhati-hati dalam bertingkah laku di sekolah. Siswa akan berfikir kembali untuk melakukan kesalahan atau pelanggaran terhadap tata tertib sekolah jika tidak ingin dikembalikan kepada orang tuanya tanpa mengalami tekanan secara fisik. Efektivitas penggunaan *punishment point system* telah cukup banyak diteliti, diantaranya melalui penelitian Fitriwati dkk. (2019) yang hasilnya menunjukkan bahwa *punishment point system* telah menimbulkan efek jera pada siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib, sementara itu penelitian Uyub (2011) secara kuantitatif menunjukkan adanya pengaruh positif dari penerapan *punishment point system* terhadap kedisiplinan siswa sebesar 36%.

Penerapan *punishment point system* dalam tata tertib sekolah merupakan bagian dari proses belajar yang berlangsung di sekolah, sehingga landasan pemikiran dari penerapannya pun tidak terlepas dari berbagai teori pembelajaran yang banyak digunakan saat ini. *Grand theory* yang dapat melandasi penerapan *punishment point system* adalah teori belajar behavioristik. Menurut teori belajar yang paling populer ini, perubahan tingkah laku merupakan hasil dari interaksi stimulus dan respon (Slavin, 2000; Budiningsih, 2005; Syah, 2002). Lebih jauh penerapan *punishment point system* dapat dijelaskan melalui Teori Pengkondisian Operan, menurut teori yang merupakan salah satu rumpun teori behavioristik dan dikembangkan oleh B.F. Skinner ini proses belajar terjadi melalui penghargaan dan hukuman untuk perilaku, dimana individu akan membuat asosiasi antara perilaku tertentu dan konsekuensi (Skinner, 1938; Gredler, 1994). Menciptakan konsekuensi yang menyenangkan untuk mengikuti bentuk perilaku tertentu akan meningkatkan frekuensi perilaku tersebut (Skinner, 1971). Dan yang terpenting dari penerapan *punishment point system* dalam tata tertib sekolah hendaknya bersandar pada Teori Hukuman Memperbaiki/ Perbaikan, menurut teori ini hukuman dilakukan dengan maksud menyadarkan anak agar tidak mengulangi lagi perbuatannya (Marimba, 1981; Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, 1991).

Hukuman yang bersifat memperbaiki ini disebut juga hukuman yang bernilai mendidik atau hukuman pedagogis (Indrakusuma, 1973).

Salah satu sekolah yang telah cukup lama mengimplementasikan *punishment point system* dalam tata tertibnya adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Ciamis. Berdasarkan hasil observasi pendahuluan yang dilakukan peneliti terhadap sejumlah sekolah jenjang Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Ciamis, ketaatan siswa/ kedisiplinan siswa dalam melaksanakan tata tertib di SMP Negeri 1 Ciamis teramati relatif lebih baik dibandingkan dengan pelaksanaan tata tertib sekolah di beberapa Sekolah Menengah Pertama lain di Kabupaten Ciamis yang belum atau baru mulai merintis pelaksanaan *punishment point system*, lebih baiknya kedisiplinan siswa SMP Negeri 1 Ciamis teramati mulai dari cara siswa berpakaian maupun perilaku siswa selama di sekolah dalam jam pelajaran maupun di luar jam pelajaran. Lebih baiknya disiplin siswa SMP Negeri 1 Ciamis dalam melaksanakan tata tertib sekolah ini pula yang menjadi salah satu kebanggaan SMP Negeri 1 Ciamis sebagai salah satu sekolah rujukan tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Ciamis.

Berdasarkan hasil observasi pendahuluan juga dapat diketahui bahwa lebih baiknya disiplin siswa SMP Negeri 1 Ciamis dalam melaksanakan tata tertib sekolah tidak terbentuk begitu saja melainkan merupakan hasil kerja keras berbagai pihak terkait yaitu kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, orang tua serta tentu saja siswanya sendiri. Peningkatan kedisiplinan siswa SMP Negeri 1 Ciamis dalam melaksanakan tata tertib sekolah sangat terasa sekali setelah diberlakukannya *punishment point system* terhadap setiap pelanggaran tata tertib sekolah yang dilakukan siswa. Sebelum penerapan *punishment point system*, tingkat kedisiplinan siswa SMP Negeri 1 Ciamis sama saja dengan kedisiplinan siswa sekolah lain yang tidak menerapkan *punishment point system*. Pelanggaran-pelanggaran tata tertib sekolah terutama pelanggaran-pelanggaran ringan seperti pemakaian pakaian seragam tidak sesuai aturan dan pelanggaran waktu belajar merupakan hal yang cukup biasa ditemui setiap harinya. Pada umumnya siswa merasa bebas setelah menjalani hukuman yang diberikan (seperti membersihkan area sekolah, menghormat bendera di tengah lapangan) setelah melakukan

pelanggaran dan tidak masalah sewaktu-waktu melakukannya kembali asal siap untuk dihukum kembali. Namun kondisi tersebut cukup berubah setelah diterapkannya *punishment point system* dalam pelaksanaan tata tertib sekolah, meskipun tidak mendapat hukuman yang dapat dilihat secara umum seperti siswa enggan melakukan pelanggaran sekecil apapun karena telah diberitahu bahwa setiap pelanggaran sekecil apapun akan diakumulasikan sebagai poin pelanggaran tata tertib dan mempunyai konsekuensi berbeda seiring jumlah poin pelanggaran yang dilakukan.

Berdasarkan paparan latar belakang penelitian tersebut diatas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan *Punishment Point System* dalam Tata Tertib Sekolah untuk Meningkatkan Kedisiplinan Siswa (Studi Kasus di SMP Negeri 1 Ciamis)”**, untuk mengetahui lebih jauh mengenai implementasi serta implikasi *punishment point system* dalam tata tertib sekolah khususnya dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di sekolah.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan, yang menjadi permasalahan untuk diteliti adalah bagaimana implementasi *punishment point system* dalam tata tertib sekolah, implikasinya terhadap kedisiplinan siswa serta berbagai kendala dan upaya penanggulangannya. Untuk lebih memfokuskan penelitian yang dilakukan, rumusan masalah penelitian disusun dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1) Bagaimana implementasi *punishment point system* dalam tata tertib sekolah di SMP Negeri 1 Ciamis?
- 2) Bagaimana kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan *punishment point system* dalam tata tertib sekolah di SMP Negeri 1 Ciamis?
- 3) Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam mengimplementasikan *punishment point system* dalam tata tertib sekolah di SMP Negeri 1 Ciamis?
- 4) Bagaimana implikasi dari penerapan *punishment* sistem poin dalam tata tertib sekolah terhadap kedisiplinan siswa SMP Negeri 1 Ciamis?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari penerapan *punishment* sistem poin dalam tata tertib sekolah untuk meningkatkan kedisiplinan siswa khususnya di SMP Negeri 1 Ciamis. Sedangkan secara khusus, tujuan penelitian ini adalah menjawab rumusan masalah penelitian yang telah ditetapkan, yaitu:

- 1) Mengetahui implementasi *punishment point system* dalam tata tertib sekolah di SMP Negeri 1 Ciamis.
- 2) Mengetahui kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan *punishment point system* dalam tata tertib sekolah di SMP Negeri 1 Ciamis.
- 3) Mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam mengimplementasikan *punishment point system* dalam tata tertib sekolah di SMP Negeri 1 Ciamis.
- 4) Mengetahui implikasi dari penerapan *punishment point system* dalam tata tertib sekolah terhadap kedisiplinan siswa SMP Negeri 1 Ciamis.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak khususnya terhadap dunia pendidikan, paling tidak penelitian ini dapat memberikan manfaat/ signifikansi berupa:

1.4.1 Segi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penerapan *punishment point system* dengan seluruh aspeknya dalam upaya meningkatkan kedisiplinan siswa melaksanakan tata tertib sekolah.

1.4.2 Segi Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak terkait, mulai dari sekolah, dinas pendidikan, pemerintah daerah bahkan pemerintah pusat dalam menyusun dan menerapkan kebijakan dalam upaya meningkatkan kedisiplinan siswa melaksanakan tata tertib sekolah untuk

menjamin keberlangsungan pendidikan nasional dan pencapaian tujuan pendidikan nasional.

1.4.3 Segi Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi berbagai pihak diantaranya:

- 1) Mahasiswa dan peneliti dapat menggunakan penelitian ini sebagai pembandingan dan atau/ referensi bagi penelitian sejenis khususnya mengenai penerapan *punishment point system* dalam upaya meningkatkan kedisiplinan siswa melaksanakan tata tertib sekolah.
- 2) Guru, khususnya guru Pendidikan Kewarganegaraan dapat menggunakan penelitian ini sebagai masukan dalam melakukan upaya-upaya baik dalam pembelajaran maupun pembinaan siswa lainnya guna meningkatkan kedisiplinan siswa dalam melaksanakan tata tertib sekolah.
- 3) Pembaca dan Masyarakat luas dapat memanfaatkan penelitian ini sebagai sumber informasi mengenai kedisiplinan siswa dalam melaksanakan tata tertib sekolah khususnya mengenai penerapan *punishment point system* sebagai upaya meningkatkan kedisiplinan siswa.

1.4.4 Segi Isu dan Aksi Sosial

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi:

- 1) Meredam isu bahwa hukuman itu hanya bersifat fisik dan “menyakiti” bagi yang dikenai hukuman sekaligus memberi isu baru bahwa hukuman khususnya bagi siswa yang melanggar tata tertib sekolah dapat dilakukan secara lebih “manusia” tanpa melalui kekerasan fisik maupun psikis melalui penerapan *punishment point system*.

- 2) Penelitian ini dapat memberikan pencerahan bagi adanya kemungkinan untuk menerapkan *punishment point system* sebagai hukuman bagi pelanggaran-pelanggaran lain selain pelanggaran tata tertib sekolah.

1.5 Struktur Organisasi Penulisan

Laporan penelitian ini ditulis dalam bentuk skripsi dengan organisasi penulisan sesuai Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 3260/Un40/Hk/2018 Tentang Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UPI Tahun Akademik 2018, sebagai berikut:

- 1) Bab I Pendahuluan

Bab ini dimulai dengan latar belakang masalah penelitian yang mendeskripsikan alasan pemilihan masalah/ judul penelitian, kesenjangan antara harapan dan realita masalah yang diteliti, serta urgensi atau mengapa masalah yang ada perlu diteliti. Selanjutnya dideskripsikan juga perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian serta manfaat/signifikansi penelitian yang dilakukan, dan diakhiri dengan struktur organisasi penulisan untuk mempermudah pemahaman laporan penelitian ini.

- 2) Bab II Kajian Pustaka

Bab ini berisi tinjauan pustaka mengenai konsep/ teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, pemaparan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilaksanakan meliputi metode penelitian yang digunakan serta hasil penelitian yang diperoleh. Dalam bab ini juga dipaparkan mengenai kerangka berfikir yang menjelaskan posisi teoritik peneliti berkenaan permasalahan yang diteliti.

- 3) Bab III Metode Penelitian

Bab ini memaparkan metode penelitian yang digunakan, meliputi desain penelitian, partisipan dan tempat penelitian, prosedur penelitian, teknik dan instrumen pengumpulan data, teknik analisis data serta isu etis penelitian.

- 4) Bab IV Temuan dan Pembahasan

Bab ini memaparkan temuan-temuan berdasar hasil analisis data yang terkumpul serta pembahasan data-data temuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Pemaparan temuan penelitian beserta pembahasannya, menggunakan pola tematik dimana cara pemaparan temuan dan pembahasan digabungkan berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan.

5) Bab V Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi

Bab ini berisi simpulan hasil penelitian, implikasi yang timbul dari hasil penelitian serta rekomendasi sebagai tindak lanjut dari penelitian yang telah dilaksanakan.

